



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 31 huruf (d), Pasal 132 ayat (2), Pasal 89 dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembar Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut DPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah di Bidang Kearsipan Daerah.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk

- komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
 9. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
 10. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
 11. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
 12. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
 13. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
 14. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
 15. Klasifikasi akses arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
 16. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
 17. Biasa/terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
 18. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
 19. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat

termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

20. Sangat rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
21. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat di akses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
22. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
23. Pengguna internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
24. Pengguna eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
25. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
26. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi Badan Publik.

Pasal 2

Sistem Klasifikasi Kemanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksud untuk :

- a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
- b. mendorong unit-unit kerja untuk mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan

- kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
- c. tersedianya informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan

lapangan.

- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

BAB II
KETENTUAN DAN PROSEDUR
Pasal 6

- (1) Arsip dinamis dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia.
- (2) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.
- (3) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
- (4) Arsip dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh pengguna internal dan eksternal.
- (5) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintah daerah Kabupaten, dapat mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tinggi madya, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan tinggi pratama di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tinggi pratama, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak

- dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerja/pembidangannya kecuali telah mendapatkan izin;
- d. Kepala Perangkat Daerah sebagai pimpinan tinggi pratama, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - e. Pejabat Eselon III sebagai pejabat administrator, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - f. Pejabat Eselon IV sebagai pejabat pengawas, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa;
 - g. pejabat fungsional, hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi biasa;
 - h. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengakses arsip dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan
 - c. publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah

yang jenis arsipnya dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
 - c. aplikasi pengelolaan arsip dinamis SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamsi)

Pasal 8

Arsip dinamis Pemerintah Daerah terbagi menjadi 4 (empat) kategori yang meliputi:

- a. biasa/terbuka;
- b. terbatas;
- c. rahasia; dan
- d. sangat rahasia.

Pasal 9

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk

ke dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

- a. arsip dinamis fungsi fasilitatif dari lingkungan Sekretariat Dinas/Badan/ Biro yang meliputi fungsi Kepegawaian, Keuangan, dan Non Keuangan dan Non Kepegawaian

Pasal 10

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan arsip yang memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan BAPERJAKAT, rekam medis pegawai, dan lain-lain;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang Pemerintah Daerah, dan lain-lain;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen, dan lain-lain;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja, dan lain-lain; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga, dan lain-lain.

Pasal 11

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga

mengganggu kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. arsip dinamis yang tercipta berkenaan dengan masalah Keorganisasian, Kepegawaian, dan Hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*, dan lain-lain;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Umum/ Aset seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain; dan
- c. arsip dinamis yang tercipta dari fungsi Pengawasan seperti Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dan lain-lain.

Pasal 12

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori arsip sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mengandung dampak yang sangat luas hingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa yang meliputi:

- a. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu:
 1. arsip dinamis yang informasinya dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. arsip dinamis yang informasinya mengandung identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. arsip dinamis yang informasinya mengandung data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. arsip dinamis yang informasinya dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. arsip dinamis yang informasinya membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana

penegak hukum.

- b. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. arsip dinamis yang informasinya mengandung tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. arsip dinamis yang informasinya mengandung memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. arsip dinamis yang informasinya mengandung Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. arsip dinamis berupa gambar, peta, dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. arsip dinamis berupa data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. arsip dinamis berupa sistem persandian negara; dan/atau
 7. arsip dinamis berupa sistem intelijen negara.
- c. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- d. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat merugikan ketahanan ekonomi

nasional, seperti:

1. arsip dinamis berupa rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. arsip dinamis berupa rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. arsip dinamis berupa rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. arsip dinamis berupa rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. arsip dinamis berupa rencana awal investasi asing;
 6. arsip dinamis berupa proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. arsip dinamis berupa hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- e. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, seperti:
1. arsip dinamis berupa posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. arsip dinamis berupa korespondensi diplomatik antar negara;
 3. arsip dinamis berupa sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. arsip dinamis berupa perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

Pasal 13

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media

simpan arsip.

- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas disimpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.

Pasal 14

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File* Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.
- (4) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (5) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PAA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas/terbuka, daftar arsip rahasia dan daftar arsip sangat rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

Pasal 16

(1) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di Records Centre dan Central File.

Pasal 16

Tabel Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. DR. H. MUHAMMAD YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH.,M.SI.,MH.	
4. A. ERNI, SH.,M.SI	
5. RANLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 19 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI ISLAMUDDIN

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONE**

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
II. FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEJABAT NEGARA						
	800	A. Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian				
	800:03:00	1. Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	800:06:00	2. Penyusunan Kebijakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	800:09:00	3. Perumusan Kebijakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	800:10:00	4. Pemberian masukan dan dukungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	800:11:00	5. Penetapan Kebijakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	800:12:00	6. Memorandum of Understanding	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	819	B. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
	819.01	1. Perencanaan Kebutuhan ASN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	819:01:01	a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan				
	819:01:02	b. Analisis Kebutuhan				
	819.01.02.01	1) Aparatur Sipil Negara				
	819.01.02.02	2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
	819:01:03	c. Pengolahan data kebutuhan				
	819.02	2. Perencanaan Pertimbangan Formasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	819:02:01	a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN				
	819:02:02	b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas				
	819.03	3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	819.04	4. Standarisasi Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	819:04:01	a. Informasi Jabatan				
	819:04:02	b. Kompetensi Jabatan				
	819:04:03	c. Klasifikasi Jabatan				
	871	C. Formasi dan Pengadaan Pegawai				
	871.01	1. Formasi ASN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	871:01:01	a. Usulan formasi disertai dengan :				
	871.01.01.01	1) analisa jabatan				
	871.01.01.02	2) beban kerja				
	871.01.01.03	3) Evaluasi Jabatan				
	871:01:02	b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN				
	871:01:03	c. Persetujuan Formasi				
	871:01:04	d. Penetapan Formasi				
	871:01:05	e. Penetapan Formasi Khusus				
	810	2. Pengadaan ASN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	810.01	a. Proses Rekrutmen ASN				
	810.02	b. Penetapan Pengumuman Kelulusan				
	810.03	c. Berkas Lamaran yang tidak diterima				
	810.04	d. Nota Usul Pengangkatan ASN				
	810.05	e. <i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)				
	810.06	f. Berkas sanggahan terhadap permasalahan CPNS				
	818	3. Sistem Rekrutmen ASN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	818.01	a. Pengelolaan sistem rekrutmen				
	818:01:01	1) standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai				
	818:01:02	2) kisi kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian				
	818:01:03	3) evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi				
	818.02	b. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi				
	818:02:01	1) Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian				
	818:02:02	2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi				
	818:02:03	3) Sertifikasi dan pelaporan				
	818.02.03.01	a. penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan				
	818.02.03.02	b. pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	820	D. Mutasi Pegawai				
	820.01	1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Kab. Bone
	820.02	2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	820.03	3. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan	BKD Kab. Bone
	820.04	4. Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan	BKD Kab. Bone
	820.05	5. Usulan Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	820.06	6. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya	BKD Kab. Bone
	837	E. Pengembangan Karir				
	837.01	a. Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	837.01.01	1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan				
	837.01.02	2) Pelaksanaan				
	837.01.03	3) Pelaporan				
	837.01.04	4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) / Sertifikat				
	837.02	b. Usulan Penyesuaian ijazah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	837.03	c. Penyusunan sistem karier	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	837.04	d. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	837.05	e. Angka Kredit	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	837.05:01	a. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit				
	837.05.02	b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit				
	867	F. Kinerja Aparatur Sipil Negara				
	867.01	1. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	867:01:01 867:01:02 867:01:03	a. Sistem penilaian kinerja ASN b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN c. Penilaian kinerja pegawai ASN				
	867.02	2. Pengelolaan data base dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	867:02:01 867:02:02 867:02:03	a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN c. Teknis penilaian kinerja ASN				
	867.03	3. Hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	869	G Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				
	869.01	1. Kode Etik Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	869.02	2. Disiplin	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	869.02:01 869:02:02	a. Penegakan Disiplin b. Peningkatan Disiplin				
	869.03	3 Pemberhentian	Terbatas	Eselon III		BKD Kab. Bone
	869:03:01 869:03:02 869:03:03 869.04	a. Pemberhentian dengan hormat b. Pemberhentian tidak dengan hormat c. Pemberhentian Sementara 4. Pensiun	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	869:04:01 869.04.01.01 869.04.01.02	a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara 1) Administrasi pensiun ASN 2) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun				
	869:04:02	b. Penetapan Pensiun ASN				
	869:04:03	c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN				
	869:04:04	d. Pensiun Pejabat Negaradan Janda Dudanya				
	804	H Bantuan Hukum				
	804.01	1. Pemberian Bantuan Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	804.02	2. Bantuan Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	830	I. Status dan Kedudukan Pegawai				
	830.01	1. Pertimbangan status kepegawaian				
	830:01:01	a. analisis status kepegawaian				
	830:01:02	b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian				
	830.02	2. Pertimbangan kedudukan kepegawaian				
	830:02:01	a. Analisis kedudukan kepegawaian				
	830:02:02	b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian				
	830.03	3. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai				
	830.04	4. Perselisihan/sengketa kepegawaian				
	836	J. Sistem Informasi Kepegawaian				
	836.01	a. Pengolahan data dan informasi kepegawaian				
	836:01:01	1) Pengelolaan database ASN				
	836:01:02	2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN				
	836.02	b. Informasi Kepegawaian				
	836:02:01	1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN				
	836:02:02	2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN				
	836:02:03	3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik				
	836.03	2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian				
	836.04	3. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian				
	836:04:01	a. Arsip kepegawaian elektronik				
	836:04:01.01	1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian				
	836:04:01.02	2) Perekaman dan arsip kepegawaian				
	836:04:01.03	3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik				
	836:04:02	b. Arsip Kepegawaian Fisik				
	801	K. Pengawasan dan Pengendalian				
	801.01	1. Formasi, pengadaan dan pasca diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	801:01:01	a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan				
	801:01:02	b. Monitoring dan evaluasi				
	801:01:03	c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan				
	801.02	2. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	801:02:01 801:02:02 801:02:03 801.03	a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 3. Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	801:03:01 801:03:02 801:03:03 801.04	a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 4. Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	801:04:01 801:04:02 801:04:03 801.05	a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 5. Laporan hasil pengawasan dan pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	801.06	6. Berkas sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	803	L. Administrasi Pegawai				
	803.01	1. Surat Perintah Dinas / Tugas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	803.02	2. Cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	803.03	3. Cuti alasan penting	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	803.04	4. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	803.05	5. Dokumentasi identitas pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	803:05:01 803:05:02 803:05:03 803:05:04	a. Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu b. Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan c. Laporan pajak penghasilan pribadi (LP2P) d. Keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4)				
	803.06	6. Berkas kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	803.07	7. Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	803.08	8. Absensi / Daftar Hadir Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840	M. Kesejahteraan Pegawai				
	840.01	1. Berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.02	2. Berkas tentang layanan asuransi pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.03	3. Berkas tentang layanan Tabungan perumahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.04	4. Berkas tentang layanan bantuan sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.05	5. Berkas tentang layanan pakaian dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.06	6. Berkas tentang layanan pegawai yang meninggal karena dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.07	7. Berkas tentang pemberian tali asih	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.08	8. Berkas tentang pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.09	9. Berkas tentang layanan olahraga dan rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.10	10. Berkas tentang medical record	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	840.11	11. Berkas tentang Tabungan Pensiun	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	802	N. Administrasi perseorangan				
	802.01	1. Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil/ASN	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKD Kab. Bone
	802:01:01	a. Berkas Lamaran yang diterima				
	802:01:02	b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya				
	802:01:03	c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN				
	802:01:04	d. SK Pengangkatan CASN				
	802:01:05	e. Hasil Pengujian Kesehatan				
	802:01:06	f. SK Pengangkatan ASN				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	802:01:07	g. SK Peninjauan Masa Kerja				
	802:01:08	h. SK Kenaikkan Pangkat				
	802:01:09	i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan				
	802:01:10	j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional				
	802:01:11	k. SK Perpindahan Wilayah Kerja				
	802:01:12	l. SK Perpindahan Antar Instansi				
	802:01:13	m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)				
	802:01:14	n. Berita Acara Pemeriksaan				
	802:01:15	o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN				
	802:01:16	p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk				
	802:01:17	q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan				
	802:01:18	r. SK Pemberian Uang Tunggu				
	802:01:19	s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara				
	802:01:20	t. SK Pengalihan ASN				
	802:01:21	u. SK Pemberhentian sebagai ASN				
	802:01:22	v. SK Pemberhentian Sementara				
	802:01:23	w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang				
	802:01:24	x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang				
	802:01:25	y. SK Penggantian Nama				
	802:01:26	z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran				
	802.01.26.01	aa. Akta Nikah/Cerai				
	802.01.26.02	bb. Akta Kelahiran				
	802.01.26.03	cc. Isian Formulir PU/ASN				
	802.01.26.04	dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan				
	802.01.26.05	ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol				
	802.01.26.06	ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga				
	802.01.26.07	gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang				
	802.01.26.08	hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan				
	802.01.26.09	ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional				
	802.01.26.10	jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	802.01.26.11	kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala				
	802.01.26.12	ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri				
	802.01.26.13	mm Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri				
	802.01.26.14	nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN				
	802.01.26.15	oo. Ijazah/Sertifikat				
	802.01.26.16	pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai				
	802.01.26.17	qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk				
	802.01.26.18	rr. Surat Pertimbangan Status ASN				
	802.01.26.19	ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN				
	802.01.26.20	tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik				
	802.01.26.21	karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah				
	802.01.26.21	uu. SK Pensiun				
	802.02	2. Berkas Perseorangan PPPK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	802.03	3. Berkas perseorangan pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	802:03:01	a. Bupati dan Wakil Bupati				
	802:03:02	b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD				
	802:03:03	c. Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang				
	802.04	4. Berkas perseorangan Kepala Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	868	O. Penilaian Kompetensi				
	868.01	1. Berkas Penilaian Kompetensi	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone
	868.02	2. Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BKD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
III. FUNGSI KEUANGAN						
	906	A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)				
	906.01	1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	906:01:01	a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Musrenbang Tingkat - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)				
	906:01:02	b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah				
	906:01:03	c. KUA beserta Nota Kesepakatannya				
	906:01:04	d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)				
	906:01:05	e. Nota Kesepakatan PPA				
	906:01:06	f. Prioritas Plafon Anggaran				
	906.02	2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	906:02:01	a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah				
	906:02:02	b. Dokumen RKA-SKPD				
	906.03	3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	906:03:01	a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD				
	906:03:02	b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah				
	906:03:03	c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD				
	906:03:04	d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya				
	906:03:05	e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Walikota tentang RAPBD beserta penjabarannya				
	906:03:06	f. Hasil Evaluasi Bupati tentang RAPBD				
	906:03:07	g. Penetapan Perda APBD oleh Bupati beserta penjabarannya				
	908:03:08	h. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD				
	906.04	4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	906:04:01	a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan				
	906.04.01.01	1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
		- Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD				
	906.04.01.02	2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah				
	906.04.01.03	3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya				
	906.04.01.04	4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan				
	906.04.01.05	5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan				
	906.04.01.06	6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan				
	906:04:02	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan				
	906.04.02.01	1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah				
	906.04.02.02	2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan				
	906:04:03	c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)				
	906.04.03.01	1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan:				
		- Nota Keuangan Pemerintah				
		- Materi RAPBD				
	906.04.03.02	2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah				
	906.04.03.03	3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan				
	906.04.03.04	4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya				
	906.04.03.05	5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Walikota tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya				
	906.04.03.06	6) Hasil Evaluasi Bupati tentang RAPBD Perubahan				
	906.04.03.07	7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Bupati beserta penjabarannya				
	906.04.03.08	8) Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan				
	941	B PENYUSUNAN ANGGARAN				
	941.01	1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	941.02	2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	941.03	3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	941.04	4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	944	C PELAKSANAAN ANGGARAN				
	944.01	1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM, dan SP2D) ; UP, GU, TU, LS				
	944.02	2 Pendapatan	Biasa/terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	944.02:01 944.02.01.01	a. Pendapatan Asli Daerah 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah				
	944.02.01.02	2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain: - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan - Pajak Parkir - Pajak Air Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)				
	944.02.01.03	3) Surat Ketetapan Retribusi Daerah				
	944.02.01.04	4) Bukti Penarikan Retribusi, antara lain:				
	944.02.01.04.01	a) Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan				
	944.02.01.04.02	b) Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - Retribusi Tempat Pelelangan - Retribusi Terminal				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	944.02.01.04.03	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - Retribusi Penyedotan Kakus - Retribusi Rumah Potong Hewan - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - Retribusi Penyebrangan di atas Air - Retribusi Pengolahan Limbah Cair - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 				
	944.02.01.04.04	<ul style="list-style-type: none"> c) Retribusi Perizinan Tertentu <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - Retribusi Izin Gangguan - Retribusi Izin Trayek d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 				
	944.02.01.05	5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat				
	944.02.01.06	6) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
	944.02.01.07	7) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum				
	944.02.01.08	8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
	944.02.01.09	9) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank				
	944:02:02	<ul style="list-style-type: none"> b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak 2) Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten 3) Dana Alokasi Umum (DAU) 4) Dana Perimbangan untuk Daerah Yang Tidak Menerima DAU 				
	944:02:03	<ul style="list-style-type: none"> c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah: <ul style="list-style-type: none"> 1) Alokasi Dana Penyesuaian 2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah 3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi 4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 5) Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga 				
	944:02:04	d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)				
	944:02:05	e. Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	944:02:06	f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah				
	944:02:07	g. Dokumen Piutang Daerah				
	944:02:08	h. Dokumen Pengelolaan Investasi				
	944.03	3 Belanja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	944:03:01	a. Dokumen Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal				
	944:03:02	b. Dokumen Belanja Tidak Langsung - Pegawai - Hibah - Belanja Bagi Hasil - Subsidi - Bunga - Bantuan Sosial - Bantuan Keuangan - Belanja Tidak Terduga				
	944.04	4 Pembiayaan Daerah	Biasa/terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	944:04:01	a. Bukti Penerimaan Pembiayaan - SiLPA - Dana Cadangan - Dana Bergulir - Pinjaman Daerah - Pengalihan Piutang PBBP2 menjadi PAD				
	944:04:02	b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir - Penyertaan Modal pada BUMD - Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD - Pengeluaran dari Dana Cadangan - Pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) - Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah				
	944.05	5 Dokumen Penatausahaan Keuangan - Surat Penyediaan Dana (SPD) - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	944.06	6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana <ul style="list-style-type: none"> - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Kas Pembantu (BKP) - Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek - Rekening Koran Bank - Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi - Bukti penyetoran Pajak - Register Penutupan Kas - Berita Acara Pemeriksaan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semesteran - Bukti Kas Pengeluaran berikut lampirannya 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	944.07	7 Daftar Gaji	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	944.08	8 Kartu Gaji	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	944.09	9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	944.10	10 Pertanggungjawaban APBD <ul style="list-style-type: none"> - Materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah - Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah - Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD - Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD - Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD - Permohonan Evaluasi Gubernur tentang Raperda dan Raperwali Pertanggungjawaban APBD - Evaluasi Gubernur tentang Raperda Pertanggungjawaban dan Raperwali APBD - Perda dan Perwali Pertanggungjawaban APBD 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	944.11	11 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Perubahan Saldo Lebih 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas - Laporan perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 				
	985	D PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI				
	985.01	1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.02	2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.03	3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.04	4. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement</i> , <i>Legal Opinion</i> , Surat menyurat dengan <i>Lender</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.05	5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.06	6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya :	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payment/ Transfer Procedure</i> - <i>Special Commitment/ L/C Opening</i> - <i>Special Account/ Imprest Fund</i> 				
	985.07	7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.08	8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan LuarNegeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya antara lain: SPP, Kontrak, BA dan Data Pendukung lainnya.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.09	9. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Autorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.10	10 <i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.11	11. <i>Report</i> /Laporan yang terdiri dari:	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Progress Report</i> 				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	985.12	- <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i> 12. Laporan Hutang Daerah :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.13	- Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah 13. <i>Completion Report/ Annual Report</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	985.14	14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	959	E PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)				
	959.01	1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: - Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah - Pejabat Penandatanganan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang <i>termasuk berita acara serah terima jabatan</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	993	F SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)				
	993.01	1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	993.02	2. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	993.03	3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	993.04	4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	964	G PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN				
	964.01	1. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	964.02	2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	964.03	<ul style="list-style-type: none"> - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil - Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank - Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 3. Buku Rekening Bank	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	964.04	4. Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	964.05	5. Pembukuan anggaran terdiri dari :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
		Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran				
	979	H PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN				
	979.01	1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya				
	979.02	2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll				
	981	I PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD				
	981.01	1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	981:01:01	a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu				
	981:01:02	b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu				
	981:01:03	c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda/Bawaslu, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas/Bawaslu				
	981:01:04	d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu				
	981:01:05	e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu				
	981:01:06	f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	981:01:07	g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada				
	981:01:08	h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				
	981:01:09	i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD				
	982	J. PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU				
	982.01	1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	982.02	2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	982.03	3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	982.04	4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank Transfer Bank	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	982.05	5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	983	K. PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU				
	983.01	1. Berkas Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	983.02	2. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Kabupaten, Panwasda/Bawaslu dan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) PPK dan Panwas/Bawaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	983.03	3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	984	L PEMERINTAHAN DESA				
	984.01	1 Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984.02	2 Program Kerja Pemerintahan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984:02:01	a Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa				
	984:02:02	b Rencana Kerja Perangkat Desa				
	984.03	3 Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984.04	4 Bukti Pungutan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984.05	5 Dokumen Pelepasan Eks Tanah Kas Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984:05:01	a Peraturan Keluaran Eks Tanah Kas Desa				
	984:05:02	b Permohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Desa				
	984:05:03	c Hasil Persetujuan Rapat				
	984:05:04	d Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah				
	984:05:05	e Persetujuan Bupati tentang Hasil Musyawarah Harga Tanah Kas Desa				
	984:05:06	f Proses Pelepasan Hak Tanah Kas Desa				
	984:05:07	g Pembelian Tanah Pengganti				
	984:05:08	h Musyawarah Tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi Pengganti				
	984:05:09	i Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah				
	984:05:10	j Pelepasan Tanah Hak Milik menjadi Kas Desa				
	984.06	6 Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984:06:01	a Sewa Tanah Kas Desa tidak berubah Fungsi				
	984:06:02	b Sewa Tanah Kas Desa berubah Fungsi				
	984.06.02.01	1 Peraturan Kelurahan tentang Sewa Tanah Kas Desa				
	984.06.02.02	2 Penawaran dari Penyewa				
	984.06.02.03	3 Rekomendasi Bupati tentang ijin Penyewa Tanah Kas Desa				
	984.06.02.04	4 Permohonan ijin Bupati				
	984.06.02.05	5 Ijin Bupati				
	984.07	7 Dokumen Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984:07:01	a Peraturan Desa tentang Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa				
	984:07:02	b Rekomendasi Bupati tentang Persetujuan Pembebasan Tanah				
	984:07:03	c Ijin tertulis Bupati				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	984.08	8 Surat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984.09	9 Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984.10	10 Pembukaan Kas Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984:10:01 984:10:02	a Buku Kas Umum b Buku Bantu Pengeluaran				
	984.11	11 Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984.12	12 Laporan Keuangan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	984.13	13 Pertanggungjawaban Kepala Desa(Laporan Keuangan Tahunan Desa)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	965	M. PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH				
	965.01	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	965.02	2. Pelaksanaan Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone
	965:02:01	a - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)				
		- Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut				
	965:02:02	b - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)				
		- Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut				
	965:02:03	c Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan				
	965:02:04	d Laporan Perkembangan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)				
	965:02:05	e Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	965:02:06 965.03 965:03:01 965:03:01	f Good Corporate Governance (GCG) 3. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah: a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	BPKAD Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
III. FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN						
	050	A PERENCANAAN				
	050.02	1 Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Bappeda Kab. Bone
	050.02.01	a Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Master Plan (RPJPD)				
	050.02.02	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJPD)				
	050.02.03	c Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan				
	050.03	2 Program Kerja Tahunan	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Bappeda Kab. Bone
	050.03.01	a Usulan Unit Kerja beserta data pendukung				
	050.03.02	b Proram Kerja Tahunan Unit Kerja				
	050.03.003	c Proram Kerja Tahunan				
	050.04	3 Penetapan/Kontrak Kinerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Bappeda Kab. Bone
	050.04.01	a Pimpinan Unit Kerja				
	050.04.02	b Kepala SKPD/OPD				
	050.05	4 Laporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Bappeda Kab. Bone
	050.05.01	a Laporan Berkala				
	050.05.01.01	1 Laporn Harian				
	050.05.01.02	2 Laoran Mingguan				
	050.05.01.03	3 Laporan Bulanan				
	050.05.01.04	4 Laporan Triwulanan				
	050.05.01.05	5 Laporan Semesteran				
	050.05.01.06	6 Laporan Tahunan Unit Kerja				
	050.05.01.07	7 Laporan Tahunan SKPD				
	050.05.02	b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	050.06	5 Evaluasi Program	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Bappeda Kab. Bone
	050.06.01	a. Evaluasi program unit kerja				
	050.06.02	b. Evaluasi program SKPD				
	180	B HUKUM				
	180.04	1 Program Legislasi	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	180.04	a. Program Legislasi				
	180:04:01	b. Bahan/ Materi program legislasi daerah				
	180.05	2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
		Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan				
	180.06	3. Peraturan pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah / instansi :	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
		Peraturan /Keputusan Bupati termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum.				
	180.07	4. Keputusan /Ketetapan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah / Instansi :	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	180:07:01	a. Keputusan /Ketetapan Bupati				
	180:07:02	b. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum				
	180.08	5. Instruksi / Surat Edaran :	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	180:08:01	a. Instruksi Bupati				
	180:08:02	b. Instruksi / Surat Edaran Pejabat setingkat eselon I dan II termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum				
	180.09	6. Surat Perintah :	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	180:09:01	a. Surat Perintah Bupati				
	180:09:02	b. Surat Perintah Pejabat setingkat eselon I dan II				
	180.10	7. Standar / Pedoman / Prosedur Kerja / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	180.11	8. Nota Kesepakatan / Memorandum of Understanding (MoU) / Kontrak Perjanjian Kerjasama:	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	180:11:01	a. Dalam Negeri				
	180:11:02	b. Luar Negeri				
	180.12	9. Dokumentasi Hukum	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
		Undang-Undang,Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan yang dijadikan referensi				
	180.13	10. Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	180:13:01	a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum				
	180:13:02	b. Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum				
	180.14	11. Bantuan/ Konsultasi Hukum/Advokasi	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
		Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana,Perdata, Tata usaha Negara dan Agama)				
	180.15	12. Kasus / Sengketa Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	180:15:01	a. Pidana				
		Berkas tentang kasus/sengketa pidana,baik kejahatan maupun pelanggaran :				
		- Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis				
		- Berkas pembelaan dan bantuan hukum				
		- Telaah hukum dan opini hukum				
	180:15:02	b. Perdata				
		Berkas tentang kasus/sengketa perdata :				
		- Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis				
		- Berkas pembelaan dan bantuan hukum				
		- Telaah hukum dan opini hukum				
	180:15:03	c. Tata Usaha Negara				
		Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara :				
		- Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis				
		- Berkas pembelaan dan bantuan hukum				
		- Telaah hukum dan opini hukum				
	180:15:04	d. Perburuhan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	180:15:05	Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan : - Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum d. Arbitrase				
	180:15:06	Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan : - Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum e. Sengketa adat				
	180.16	13. Perijinan Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	180.17	14. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	180:17:01	a. Hak Cipta				
	180:17:02	b. Hak Paten: Paten Biasa Paten Sederhana				
	180:17:03	c. Hak Desain Industri				
	180:17:04	d. Hak Rahasia Dagang				
	180:17:05	e. Hak Merk				
	180:17:06	f. DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)				
	180.18	15. Permohonan Haki yang ditolak (Hak Cipta,Paten,Desain Industri,Merk, Rahasia Dagang,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Hukum Setda Kab. Bone
	060	C ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN				
	060.03	1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	060.03.01	a. Pembentukan				
	060.03.02	b. Perubahan				
	060.03.03	c. Pembubaran				
	060.04	2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	060.05	3. Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	060.06	4. Evaluasi Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	060.07	5 Analisis Jabatan dan ABK	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	060.08	6 Evaluasi Jabatan	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	060.09	7 SOP (Standar Operasional Prosedur)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	060.10	8 KGB (Kenaikan Kaji Berkala) dan Cuti	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	045	D. KEARSIPAN				
	047	1 Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	047.01	a. Kartu Kendali				
	047.02	b. Buku Agenda				
	047.03	c. Lembar Pengantar/buku ekspedisi				
	047.04	d. Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan dan pengadaan Dokumen Arsip				
	045.05	2 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	045.05.01	a. DaftarArsip				
	045.05.02	b. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (Fumigasi)				
	045.03.01	3 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	048	4 Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	049	5 Penyusutan Arsip	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	049.01	a. Pemindahan Arsip Inaktif				
	049.01.01	1 Berita Acara Pemindahan				
	049.01.02	2 Daftar Pencarian Arsip yang dipindahkan				
	049.02	b. Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna				
	049.02.01	1 Berita Acara Pemusnahan				
	049.02.02	2 Daftar Pencarian Arsip yang dimusnahkan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	049.02.03	3 Rekomendasi/Pertimbangan/Pemusnahan arsip dari instansi terkait				
	049.02.04	4 Surat Keputusan Pemusnahan				
	049.03	c. Penyerahan Arsip Statis				
	049.03.01	1 Berita Acara Serah Terima Arsip				
	049.03.02	2 Daftar Pencarian Arsip yang diserahkan				
	049.04	6 Pembinaan Kearsipan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	049.04.02	a. Apresiasi/Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan				
	049.04.01	b. Bimbingan Teknis				
	049.04.03	c. Supervisi dan Monitoring				
	046	7 Pengelolaan Arsip Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Organisasi Setda kab. Bone
	046.01	a. Komunikasi kedinasan biasa				
	046.02	b. Komunikasi kedinasan dalam bentuk kode sandi				
	046.03	c. Hasil Transliterasi Sandi				
	280	E. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
	280.01	1. Telekomunikasi :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
		Administrasi penggunaan / langganan peralatan telekomunikasi meliputi : telepon,radio,teleks,TV kabel dan internet				
	280.02	2. Perjalanan Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	280.02.01	a. Dalam Negeri				
	280.02.02	b. Luar Negeri				
	280.03	3. Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang,gedung,kendaraan,wisma,rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	280.04	4. Risalah/ Notulen Rapat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	280.04.01	a. Rapat staf				
	280.04.02	b. Rapat pimpinan				
	280.05	5. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	280.06	6. Pengurusan kendaraan dinas:	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	280.06.01	a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas				
	280.06.02	b. Pemeliharaan dan perbaikan				
	280.06.03	c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan				
	280.07	7. Pemeliharaan gedung dan taman :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	280.07.01	a. Pertamanan /landscaping				
	280.07.02	b. Penghijauan				
	280.07.03	c. Perbaikan gedung				
	280.07.04	d. Perbaikan rumah dinas /wisma				
	280.07.05	e. Kebersihan gedung dan taman				
	280.08	8. Pengelolaan jaringan listrik,air,telepon,dan komputer :	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	280.08.01	a. Perbaikan /pemeliharaan				
	280.08.02	b. Pemasangan				
	280.09	9. Ketertiban dan keamanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	280:09:01	a. Pengamanan,penjagaan,dan pengawalan terhadap pejabat,kantor,dan rumah dinas :				
	280.09.01.01	1). Daftar nama satuan pengamanan				
	280.09.01.02	2). Daftar jaga / daftar piket				
	280.09.01.03	3). Catatan gangguan / pelanggaran /kejadian				
	280.09.01.04	4). Surat ijin keluar masuk orang atau barang				
	280:09:02	b. Laporan ketertiban dan keamanan				
	280.09.02.01	1). Kehilangan				
	280.09.02.02	2). Kerusakan				
	280.09.02.03	3). Kecelakaan				
	280.09.02.04	4). Gangguan				
	280.10	10 Administrasi pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	280.11	11. Administrasi pakaian dinas pegawai,satpam,petugas kebersihan dan pegawai lainnya.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	489	F HUBUNGAN MASYARAKAT				
	489.01	1. Keprotokolan :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	489:01:01	a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)				
	489:01:02	b. Buku tamu				
	489.01.03	c. Agenda kegiatan pimpinan lembaga/instansi				
	489.01.04	d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri				
	489.01.04.01	1). Kunjungan dinas pimpinan lembaga /instansi				
	489.01.04.02	2).Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai				
	489:01:05	e. Daftar nama/alamat kantor /pejabat				
	489.02	2. Dokumentasi /liputan kegiatan dinas pimpinan,acara kedinasan dan peristiwa - peristiwa bidang masing-masing,dalam berbagai media : kertas/foto/video/rekaman suara /multi media	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	489.03	3. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan :	Biasa/terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	489:03:01	a. Kliping koran				
	489:03:02	b. Brosur /Leaflet/poster /plakat				
	489:03:03	c. Pengumuman /pemberitaan				
	489.04	4. Hubungan antar lembaga Negara dan Badan Pemerintah / Instansi :	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	489:04:01	a. Hubungan antar lembaga pemerintah				
	489:04:02	b. Hubungan dengan organisasi sosial / LSM				
	489:04:03	c. Hubungan dengan perusahaan				
	489:04:04	d. Hubungan dengan perguruan tinggi /sekolah,termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)				
	489:04:05	e. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)				
	489:04:06	f. Hubungan dengan media massa :				
	489.04.06.01	1). Siaran pers/konferensi pers/press release				
	489.04.06.02	2). Kunjungan wartawan /peliputan				
	489.04.06.03	3). Wawancara				
	489.05	5. Dengar pendapat/hearing DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	489.06	6. Bahan/materi pidato/sidang MPR,DPR,DPD,kabinet,DPRD,Muspida Kabupaten	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	489.07	7. Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	489.08	8. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	489.09	9. Pameran /sayembara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	489.10	10 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada Masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Kabag. Umum Setda kab. Bone
	070	G PENELITIAN, PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN				
	070.01	1 Administrasi penelitian, pengkajian dan pengembangan meliputi: rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja, dan surat menyurat.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Balitbang Kab. Bone
	070.02	2 Hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan, mulai rancangan awal sampai dengan akhir termasukcatatan-catatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Balitbang Kab. Bone
	070.02.01	a. hasil penelitian				
	070.02.02	b. hasil pengkajiankebijakan dan strategi				
	070.03	3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Balitbang Kab. Bone
	070.04	4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Balitbang Kab. Bone
	070.05	5 Forum komunikasi penelitian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Balitbang Kab. Bone
	070.06	6 Data dan informasi penelitian dan pengembangan:	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Balitbang Kab. Bone
	070.06.01	a. data				
	070.06.02	b. statistik				
	070.06.03	c. jurnal hasil penelitian				
	070.07	7 evaluasi pelaksanaan kebijakan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Balitbang Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	070.08	8 seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Balitbang Kab. Bone
	420	H PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	420.02	1 Pedoman-pedoman Kediklatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.03	2 Kurikulum-kurikulum Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.04	3 Modul-modul Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.05	4 Panduan Fasilitator	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.06	5 Saran/rekomendasi penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.07	6 Notulen sosialisasi/ rapat koordinasi kebijakan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.08	7 Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420:08:01	a. Surat permohonan akreditasi				
	420:08:02	b. Laporan hasil verifikasi lapangan				
	420:08:03	c. berita acara rapat verifikasi				
	420:08:04	d. Berita acara rapat tim penilai				
	420:08:05	e. Surat keputusan penetapan akreditasi				
	420:08:06	f. Sertifikat akreditasi				
	420:08:07	g. Laporan akreditasi lembaga diklat				
	420.09	8 Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420:09:01	a. Surat permohonan Sertifikasi				
	420:09:02	b. Laporan hasil verifikasi lapangan				
	420:09:03	c. berita acara rapat verifikasi				
	420:09:04	d. Berita acara rapat tim penilai				
	420:09:05	e. Surat keputusan penetapan verifikasi				
	420:09:06	f. Sertifikat sertifikasi				
	420:09:07	g. Laporan sertifikasi individual				
	420.10	9 Sistem Informasi Diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420:10:01	a. Data lembaga diklat				
	420:10:02	b. Data prasarana diklat				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	420:10:03 420:10:04 420:10:05 420:10:06 420:10:07 420.11	c. Data sarana diklat d. Data pengelola diklat e. Data penyelenggaraan diklat f. Data Widyaiswara g. Data program diklat 10 Registrasi sertifikasi STTPL peserta Diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420:11:01 420:11:02 420:11:03 420.12	a. Surat permohonan kode registrasi b. Buku registrasi c. Surat penyampaian kode registrasi 11 Rencana tahunan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.13	12 Rencana penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.14	13 Penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420:14:01 420:14:02 420:14:03 420:14:04 420:14:05 420:14:06 420:14:07 420:14:08 420:14:09 420:14:10 420:14:11 420:14:12 420:14:13 420:14:14 420:14:15	a. Surat pemanggilan peserta b. Surat keputusan tim penyelenggara diklat c. Surat keputusan tim pengajar diklat d. Panduan diklat e. Laporan panitia penyelenggara diklat f. Sambutan penitia penyelenggara diklat g. Daftar peserta diklat h. Bahan ajar diklat i. Daftar hadir peserta diklat j. Daftar hadir Widyaiswara k. Formulasi evaluasi diklat l. Formulasi evaluasi widyaiswara m. Hasil formulasi evaluasi widyaiswara n. Sertifikat/STTPL o. Sambutan penutupan diklat				
	420.15	14 Laporan Penyelenggaraan Diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.16	15 Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone
	420.17	16 Evaluasi Alumni pasca Diklat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Dinas Pendidikan Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	041	I PERPUSTAKAAN				
	041.06	1 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kab. Bone
	041.06.01	a. Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit				
	041.06.02	b. Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka				
	041.07	2 Pengadaan dan pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kab. Bone
	041.07.01	a. Buku induk koleksi				
	041.07.02	b. Daftar buku terseleksi				
	041.07.03	c. Daftar buku dan pemesanan				
	041.07.04	d. Daftar Buku dalam permintaan				
	041.07.05	e. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah				
	041.07.06	f. Daftar pengiriman Bahan Pustaka Surplus				
	041.07.07	g. Lembar kerja pengolahan BP(Buram, Pengkatalogan)				
	041.07.08	h. Shelf List/Jajaran Kartu Utama (master list)				
	041.07.09	i. Daftar tambahan buku(Akses list)				
	041.07.10	j. Daftar/jajaran kendali (subyek dan Pengarang)				
	041.08	3 Layanan jasa Perpustakaan dan Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kab. Bone
	041.08.01	a. Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka				
	041.08.02	b. Pertanyaan rujukan dan jawaban				
	041.09	4 Preservasi Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kab. Bone
	041.09.01	a. Survei kondisi Bahan Pustaka				
	041.09.02	b. Reprografi Bahan Pustaka				
	041.10	5 Pembinaan Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	041.10.01	a. Bimbingan Teknis				
	041.10.02	b. Penyuluhan				
	041.10.03	c. Sosialisasi				
	490	J TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
	490.01	1. Rencana strategi / <i>master plan</i> Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Diskominfo Kab. Bone
	490.02	2. Dokumentasi arsitektur : - Sistem informasi - Sistem aplikasi - Infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Diskominfo Kab. Bone
	490.03	3. Dokumentasi Implementasi : - Sistem informasi - Sistem aplikasi - Infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Diskominfo Kab. Bone
	490.04	4. Perekaman dan Pemuktahiran Data : - Formulir lisan - Daftar petugas perekaman - Jadwal pelaksanaan - Laporan hasil perekaman dan pemuktahiran data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Diskominfo Kab. Bone
	490.05	5. Migrasi Sistem Aplikasi dan Data : - Perencanaan migrasi - Pelaksanaan migrasi - Berita acara kegiatan migrasi - Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi - Laporan hasil migrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Diskominfo Kab. Bone
	490.06	6. Dokumen <i>Hosting</i> : - Formulir permintaan <i>hosting</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Diskominfo Kab. Bone

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGELOLA
1		2	3	4	5	6
	490.07	- Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan <i>hosting</i> 7. Layanan Back-up Digital	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Bone	Diskominfo Kab. Bone
	700	K PENGAWASAN				
	700.01	1. Rencana Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Inspektur Daerah Kab. Bone
	700:01:01	a. Rencana strategis pengawasan				
	700:01:02	b. Rencana kerja tahunan				
	700:01:03	c. Rencana kinerja tahunan				
	700:01:04	d. Penetapan kinerja tahunan				
	700:01:05	e. Rakor pengawasan tingkat nasional				
	700.02	2. Pelaksanaan Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Bone	Inspektur Daerah Kab. Bone
	700:02:01	a. Laporan hasil audit (LHA), Laporan hasil pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)				
	700:02:02	b. Laporan hasil audit (LHA), Laporan hasil pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)				
	700:02:03	c. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut				
	700:02:04	d. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat				
	700:02:05	e. Laporan Pemutakhiran Data				
	700:02:06	f. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara				
	700:02:07	g. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Departemen/ LPND				
	700:02:08	h. Good Corporate Governance (GCG)				

SUDAH DITELITI OLEH	
TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. ... YAMIN AT. M.SI	
2. H. ... YUDIN, S. Sus. MM	
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

Bupati Bone

A. FAHSAR M. PADJALANGI